

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202231964, 25 Mei 2022

Pencipta

Nama : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**
Alamat : Jl. Badak No. 16 LK 1 RT 006, Kelurahan Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35147
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Selayang Pandang Lampung Barat "Kampoeng Kopi" Sinergitas Pengembangan Potensi Pariwisata Kampoeng Kopi Bumi Beguay Jejama**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Oktober 2021, di Yogyakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000347562

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

EXPURE



Selayang Pandang
LAMPUNG BARAT
"KAMPOENG KOPI"

*Sinergitas Pengembangan Potensi Pariwisata
Kampoeng Kopi Bumi Beguay Jejama*

Dian Kagungan

Selayang Pandang
LAMPUNG BARAT
"KAMPOENG KOPI"

Sinergitas Pengembangan Potensi Pariwisata
Kampoeng Kopi Bumi Beguay Jejama

Dian Kagungan

EXPLORE

BELAYANG PANDANG LAMPUNG BARAT "KAMPOENG KOPI"; Sinergi
Potensi Pariwisata Kampoeng Kopi Bumi Beguay Jejama

oleh Dian Kagungan

Hak Cipta © 2021 pada penulis

Edisi Pertama: Cetakan 1 - 2021

EXPLORE

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perolehan dari penerbit.

ISBN: 978-602-52170-8-1

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xii + 60; Kertas Isi: H
Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing

Selayang Pandang LAMPUNG BARAT "KAMPOENG KOPI"

**Sinergitas Pengembangan Potensi Pariwisata
Kampoeng Kopi Bumi Beguay Jejema**

Agrowisata Kampoeng Kopi Pekon Rigis Jaya Kabupaten Lampung Barat merupakan lokasi pariwisata sebagai sarana edukasi bagi pengelolaan kopi mulai dari proses pembibitan hingga proses siap konsumsi. Peran penting Pemerintah dalam bidang kepariwisataan di dasarkan pemikiran birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat.

Buku ini berusaha menemukan titik kompromi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan masyarakat sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi. Sinergitas aktor pentahelix dalam pengembangan agrowisata Kampoeng Kopi merupakan keselarasan sistem dan hubungan antar aktor Pentahelix bagi pembangunan Agrowisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya.



Dian Kagungan, Dosen Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung pendidikan S1 Fisip Universitas Lampung (1992), Magister Hukum Universitas Lampung (2005), S3 Studi Pembangunan Fisip Universitas Lampung tahun 2020-2023 (sedang ditempuh). Aktif kegiatan riset hibah DRPM-Kemendikbud RI 2009 sampai sekarang. Buku: Administrasi Pertanahan, Kebijakan Hutan kemasyarakatan, Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru, Kebijakan Penatakelolaan Teluk Kiluan. Selain kegiatan penelitian dan menulis, juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Diterbitkan Atas Kerjasama dengan



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS LAMPUNG**

ISBN: 978-602-52170-8-1



9 786025 217081

KATA PENGANTAR

Sinergitas aktor-aktor pentahelix dalam pengembangan agrowisata Kampoeng Kopi merupakan keselarasan sistem dan hubungan antar aktor Pentahelix untuk mencapai situasi yang kondusif bagi pembangunan inklusif pada Agrowisata Kampoeng Kopi Riris Jaya. Buku ini berusaha menemukan titik kompromi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata kampoeng kopi. Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari empat bab (selain pendahuluan), yaitu ***bab ke dua*** berisi Kerangka Dasar Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kampoeng kopi dan juga dilengkapi teori mendasar tentang kebijakan pemberdayaan, dan mengelaborasi beberapa studi pendahuluan yang digunakan sebagai basis dalam memahami perspektif kebijakan pembangunan kepariwisataan kampoeng kopi

Dalam konteks kajian penelitian dalam buku ini yang dimaksud dengan sinergitas pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut. Data di peroleh berdasarkan hasil kajian lapang, bahwa *dalam bidang pariwisata, pentingnya* sinergitas pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut. ***Bab ke tiga***, gambaran umum lokasi penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. ***Bab ke empat*** Sinergitas Pembangunan Pariwisata Kampoeng Kopi, yakni Sinergitas aktor-aktor pentahelix dalam pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi merupakan keselarasan sistem dan hubungan antar aktor Pentahelix untuk mencapai situasi yang kondusif bagi

pembangunan inklusif pada Agrowisata Kampoeng Kopi Riris Jaya. Dalam pengembangan pariwisata berbasis agrowisata kampoeng kopi ini, tentunya tidak terlepas dari peran para *stakeholder* dalam proses pengembangannya. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi ini diantaranya 1) Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2) Badan Penelitian Dan Pengembangan, 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 4) Dinas Perkebunan dan Peternakan, 5) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 6) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 7) Dinas Koperasi dan Perdagangan, 8) Perguruan Tinggi. **Bab ke lima** merupakan bagian akhir dari buku ini berisi kata-kata penutup (*closing statement*), sebagai rangkuman dari keseluruhan uraian dari buku. Pada bab ini juga dikemukakan rekomendasi dari hasil penelitian ini

Kehadiran buku ini diharapkan sebagai *entry point* pentingnya membangun sinergitas antar aktor yang terlibat dalam pembangunan wisata kampoeng kopi. Akhir kata semoga buku ini berguna bagi dunia *scientific* dan pembangunan

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN

Buku Referensi

: Selayang Pandang Lampung Barat “Kampoeng Kopi”
 Sinergritas Pengembangan Potensi Pariwisata Kampoeng
 Bumi Beguay Jejama

Penulis

Nama Lengkap

: Dr. Dian Kagungan, M.H.

Jenis kelamin

: Perempuan

NIP/NIDN

: 196908151997032001/0015086903

Disiplin Ilmu

: Ilmu Administrasi Negara

Kategori/Golongan

: Pembina/ Gol 4A

Jabatan

: Lektor Kepala

Fakultas / Jurusan

: FISIP/ Ilmu Administrasi Negara

Alamat Kantor

: Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, Kota
 Bandar Lampung.

Telepon kantor

: 0721704626

Publikasi

: Edisi Pertama (Graha Ilmu 2021)

: ISBN : 987-602-52170-8-1

Bandar Lampung, 10 Januari 2022

Mengetahui

Dekan Bidang

Pendidikan dan Kerjasama FISIP


 Dy Hermawan, S.Sos., M.Si.
 NIP. 197507202003121002

Penulis



Dr. Dian Kagungan, M.H.
 NIP. 196908151997032001

Mengesahkan,
 Ketua LPPM Universitas Lampung


 Dr. Ie Lusneilla Afriani, D.E.A.
 NIP. 1965101993032008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisata	3
1.2 <i>Tourism Law and Hospitality Law</i>	6
1.3 Konsep Sinergitas	10
1.4 Konsep Model Pentahelix	11
1.5 Peran Aktor Pentahelix	12
1.6 Pariwisata Kampong Kopi Sebagai Obyek Studi, Sistem dan Sosial Budaya	14
1.7 Wisatawan dan Pariwisata	14
1.8 Gambaran Umum Isi Buku	19
Daftar Pustaka	20
2 KERANGKA DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KAMPOENG KOPI	22
3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
3.1 Gambaran Umum Pekon Rigis Jaya	29
3.1.1 Profil Desa Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat	29
3.1.2 Sejarah Pekon Rigis Jaya	31
3.1.3 Visi dan Misi Pekon Rigis Jaya	31

3.1.4	Struktur Organisasi Pekon Rigis Jaya	32	
3.1.5	Kependudukan Pekon Rigis Jaya.....	34	
3.1.6	Gambaran Agrowisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya	34	
4. SINERGITAS AKTOR PENTAHHELIX DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPOENG KOPI			37
4.1.1	Sinergitas Aktor Pentahelix Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampoeng Kopi.....	37	
4.1.2	Kesimpulan	55	
DAFTAR PUSTAKA			58
TENTANG PENULIS			

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pemangku Rigis Jaya.....	30
Tabel 2. Golongan Usia Masyarakat Pekon Rigis Jaya	34
Tabel 3. Jenjang Pendidikan Masyarakat Pekon Rigis Jaya.....	35
Tabel 4. Matrik Sinergitas Aktor Pentahelix dalam Pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi.....	39
Tabel 5. Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Usaha	52
Tabel 6. Matrik Pembangunan Inklusif dalam Pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lampung Barat 2013-2020	20
Gambar 2. Unsur dalam Model Pentahelix	25
Gambar 3. Struktur LPH (Laporan Hasil Pemeriksaan) Pekon Rigis Jaya	32
Gambar 4. Struktur Aparatur Pekon Rigis Jaya	33

1.

PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031. Tujuan dari peraturan ini yaitu 1) Mengintegrasikan pembangunan kawasan pariwisata daerah dengan arahan tata ruang serta pembangunan infrastruktur daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan; 2) Menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan produk pariwisata; 3) Memantapkan potensi alam dan budaya masyarakat sebagai bagian dari identitas pariwisata daerah; 4) Mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif serta komunikatif sehingga diharapkan nantinya akan mampu memperkuat citra daerah sebagai kabupaten kreatif; 5) Memperkuat sistem industri pariwisata daerah melalui pembangunan industri kreatif berbasis masyarakat; 6) Membangun sistem kelembagaan pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri akan mampu mengendalikan pembangunan pariwisata sekaligus menarik minat para investor untuk mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan; serta 7) Mengembangkan struktur pemerintah dan sistem pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah penghasil serta penyumbang kopi terbesar di Provinsi Lampung, dengan luas area lahan kopi sekitar 53.606 hektar dengan jumlah produksi pertahun mencapai 52.644,9 ton. Kabupaten Lampung Barat juga merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang

tinggi dengan pemandangan alamnya yang indah sebagai daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Kabupaten Lampung Barat.

Salah satu sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Lampung Barat yaitu Agrowisata Kampoeng Kopi yang merupakan lokasi pariwisata yang berfungsi pula sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pengelolaan kopi mulai dari proses pembibitan hingga proses siap konsumsi.

Peran penting Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan didasarkan bahwa pada pemikiran bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Birokrasi juga berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan antisipatif untuk meminimalisasi berbagai dampak negatif, mengingat banyaknya potensi persoalan yang muncul dari kepariwisataan

Peran stakeholder terhadap pembangunan kepariwisataan juga tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak terkecuali proses kolaboratif tata kelola pariwisata "kampoeng kopi." Proses tatakelola pariwisata merupakan suatu proses *adaptive system, dan beorientasi pada konsensus*. Berbasis 2 pakar, yaitu : Anshell dan Gash (2008) memetakan proses kolaboratif yang dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*)

Proses kolaboratif pariwisata tatakelola pariwisata, diasumsikan akan terjadi jika terpenuhinya beberapa syarat, 1. Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi sebenarnya adalah *citizen power*, (menurut Arnstein) 2. Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, berarti tidak ada dominasi tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati 3. Terdapat aktor-aktor yang kompeten

1.1 Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Dalam kehidupan di negara moderen saat ini, kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kebijakan yang baik dapat diilustrasikan seperti seorang diRigen yang mengatur permainan sebuah orkestra yang terdiri dari banyak pemain musik dengan jenis alat musik yang berbeda-beda jenis, suara, dan waktu memainkannya, sehingga menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah. Dengan demikian setiap insan pariwisata, dan terlebih lagi para birokrat, baik di lingkungan Pemerintah maupun Pemerintahan daerah, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dalam kepariwisataan.

Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan seringkali tidak terlalu diprhatikan. Orang yang mendengar istilah "kebijakan pembangunan kepariwisataan" pada umumnya secara otomatis akan memfokuskan perhatiannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penggolongan kepariwisataan. Namun demikian, beberapa teori terkait dengan konsep dimaksud perlu diungkapkan dalam tulisan ini karena membantu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan. Ketika kita berbicara mengenai masalah kebijakan pembangunan kepariwisataan, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian istilah "kebijakan" dan "pembangunan". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, istilah "kebijakan" didefinisikan sebagai:

"(1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjad garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan."

Sementara itu dalam Kamus Merriam-webster, istilah "*policy*" yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai "kebijakan", diartikan sebagai aturan atau ide secara resmi di akui sebagai pedoman untuk menentukan pelaksanaan

aktivitas: *"an offcially accepeted set of rules or idieas about what should be done"*. Dengan demikian istilah *"policy"* atau "kebijakan" (khususnya definisi nommer 2) pada prinsipnya adalah parameter yang dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakamn sebuah aktivitas. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah bahwa tidak dijelaskan secara tegas apakah "kebijakan" juga meliputi perturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan istilah *"policy"* yang lebih jelas pengertiannya.

Definisi sederhana lainnya mengenai istilah tersebut adalah arah tindakan atau cara bertindak dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, yang menentuka pengambilan keputusan dimasakini dan masa depan: *"A definite course or method of action selected from among alternativesand in the light on given conditions to guede and determine present and future decisions"*. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, menurut Edgell dan Swanson (2013), pemahaman mengenai kebijakan dibidang kepariwisataan akan menjadi lebih mudah jika dimulai dari definisi Thomas Dye mengenai "kebijakan publik", yaitu tindakan apapun melakukan atau tidak melakukan yang dipilih oleh pemerintah: *"whatever government choose to do or not to to"*.

Sementara itu, istilah "pembangunan" diartikan sebagai suatu proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa (Sasmojo, 2004 : 1), tentunya ke arah yang lebih baik. Jika kemudian dikaitkan dengan kedua istilah tersebut dan istilah "kebijakan publik", maka "kebijakan pembangunan" akan memiliki pengertian sebagai *parameter yang secara resmi diakui yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terwujudnya proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa ke arah yang lebih baik*.

Dalam bidang kepariwisataan, dikenal pula istilah dalam bahasa Inggris yaitu *"tourism policy"*. Menurut Goeldner dan Ritchie (2009:414), istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

"Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies taht provide a framework within which

the collective and individual decisions directly affecting long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken”.

Pendapat lain mengenai istilah ini diungkapkan pula oleh Paul S. Biederman (2008) didalam buku yang berjudul *Travel and Tourism: An Industry Primer*, yang menambahkan aspek sosial didalam kebijakan kepariwisataan:

“A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, locality, or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The ker principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens.”

Kedua definisi tersebut diatas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *tourism policy* atau yang penulis terjemahkan sebagai “kebijakan dibidang kepariwisataan” adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan ini harus memberikan jaminan bahwa tujuan utamanya adalah membuat masyarakat yang bersangkutan yang tinggal didestinasii pariwisata memperoleh keuntungan optimal dari kontribusi kepariwisataan dibidang sosial dan ekonomi dalam bentuk kemajuan dan kualitas hidup. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, maka berarti aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata tersebut harus mengarah kepada perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa.

Edgell dan Swanson (2013) berpendapat bahwa pada intinya kebijakan dibidang kepariwisataan adalah setiap tindakan pemerintah baik di bidang legislatif, administratif, maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan. Termasuk di dalamnya adalah aktivias pemasaran, perencanaan dan keberlanjutan. Menurut mereka bentuk kebijakan tersebut adalah berbagai pedoman (aturan), prinsip dan prosedur, yang disusun secara etis dan sifatnya fokus terhadap suatu persoalan serta mewakili harapan suatu masyarakat (atau bangsa) dalam hubungannya dengan aspek perencanaan, pembangunan, produk, jasa, pemasaran dan aspek keberlanjutannya.

1.2 *Tourism Law and Hospitality Law*

Masyarakat awam mungkin bingung ketika kemudian istilah kebijakan di bidang kepariwisataan dihubungkan dengan hukum kepariwisataan, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *tourism law* dan *hospitality law*. Istilah *tourism law* itu sendiri merujuk pada segala macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas perjalanan seseorang, termasuk di bidang angkutan udara, sistem lisensi, warisan budaya, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, persaingan usahadan sebagainya.

Sementara itu, *hospitality law* di definisikan sebagai segala macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri yang terlibat dalam penyediaan makanan, fasilitas akomodasi, perjalanan dan hiburan (*entertainment*) bagi wisatawan. Dengan demikian, kedua istilah tersebut sebenarnya dapat dikatakan memiliki pengertian yang hampir sama. Dalam hubungan dengan istilah kebijakan di bidang kepariwisataan, walaupun bukan merupakan persoalan yang signifikan, perlu dijelaskan sedikit mengenai perbedaan diantara keduanya. Hukum kepariwisataan sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan di bidang kepariwisataan (ESCAP, 2001).

Walaupun demikian, sebagian besar substansi kebijakan di bidang kepariwisataan dapat merupakan aturan hukum, sebagai mana fakta yang terjadi di AS: "*Robert James, founder of one of the largest hotel contract management companies in the United States once estimated that 60 to 70 percent of the decisions he made on a daily basis involved some type of legal dimension.*"

Oleh karena itu, masalah hukum menjadi elemen sangat penting dalam pembahasan mengenai kebijakan di bidang kepariwisataan. Salah kaprah yang sangat umum terjadi dalam pemikiran para birokrat di Indonesia yang mengelola kepariwisataan adalah bahwa pembangunan kepariwisataan di anggap sama dengan "pemasaran pariwisata" dalam arti kegiatan pemasaran produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Paradigma tersebut menyertakan fungsi institusi pemerintahan di bidang kepariwisataan (*government institution*) dengan sebuah perusahaan jasa pariwisata (*tourism company*).

Birokrat pengelola kepariwisataan seharusnya memahami bahwa kebijakan dibidang kepariwisataan yang baik menyangkut kepentingan publik yang jauh lebih luas yaitu pelayanan kepada seluruh anggota masyarakat, tidak hanya kepada kalangan bisnis sehingga evaluasi mengenai dampaknya secara komprehensif terhadap kehidupan masyarakat lokal juga menjadi isu sangat penting.

“Sound tourism policy goes well beyond the marketing and promotion objectives to consider and evaluate tourism’s comprehensive effect on the host community...policy should serve not properly applied, is a vehicle for a government to direct and stimulate the tourism industry, as for example through tax legislation and sponsoring tourism research...One conclusion to be drawn from this analysis is tourism is more than just marketing and tourism policy should reflect that.”

Sebagaimana diketahui, kepariwisataan tidak hanya berkaitan dengan fenomena orang yang melakukan perjalanan. Kepariwisata juga berdampak terhadap masalah-masalah seperti pencapaian tujuan sosial dan budaya, kebijakan luar negeri, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Disamping itu kepariwisataan bergantung kepada produk-produk dari sektor lain. Sebagai contoh, di banyak negara, produk ekspor utama dibidang pertanian, termasuk daun tembakau, hewan ternak hidup dan produk hasil hutan, merupakan bahan-bahan pendukung kepariwisataan:

“Tourism asset of dynamic and growing industries involves not just people traveling, but also planning and protecting the destinations and attractions to which people travel ...Tourism policy should aim to improve quality-of-life of the local citizenry and any given destination. Good tourism policy will assist in that process...Tourism has strong links to cultural and social pursuits, foreign policy initiatives, economic development, environmental goals, and sustainable planning...Tourism is also wide ranging in the sense that it demands products from other sectors of the economy. For example, many economic top agricultural exports include leaf tobacco, live animals products, cotton, and forestry products, that supply demand throughout the world. These products are also assistance goods used by tourism.”

Satu hal yang menarik yang perlu dipahami adalah bahwa kebijakan dan perencanaan kepariwisataan yang baik hanya dapat diwujudkan melalui aktivitas penelitian yang solid. Penelitian kepariwisataan dapat menjadi media diskusi hingga tuntas, pendekatan-pendekatan yang bersifat inovatif dan kreatif yang berbeda dari

pendekatan konvensional para pembuat kebijakan dan pakar kepariwisataan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan dibidang kepariwisataan seharusnya bersifat fleksibel dan memiliki daya tahan yang kuat dalam rangka mendorong perkembangan produk wisata dan menghadapi ketidak setabilan situasi ditingkat global:

“Tourism policymakers’ to fashion policies and plans the future will depend upon solid research to understand better and accept new concepts as they appear. such research, conducted in a chaotic world, may hammer out innovation and creative approaches that differ traditional guidelines for policy once held by tourism managers and scholars. The policies must be flexible and resilient enough to foster the development of new policy that is firmly in place can be rendered useless whenever tragic events or new global disturbances erupt as has been the case in recent years.”

Agar kepariwisataan dapat berjalan berkelanjutan dimasa depan, sangat diperlukan keberadaan perencanaan dan kebijakan kepariwisataan yang efektif sejak saat ini. Para pembuat kebijakan, perencanaan dan pemangku kepentingan lainnya harus mampu mengidentifikasi kecenderungan yang berkembang dalam kepariwisataan dan secara terintegrasi melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang stabil dan produk wisata yang berkualitas, yang menguntungkan baik wisatawan maupun penduduk setempat.

Untuk dapat membuat kebijakan yang tidak merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang, diperlukan pemahaman mengenai dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan kepariwisataan. Bila dampak negatif dimaksud dapat diketahui, diperbaiki dan dikelola secara memadai, kemudian dampak positifnya dibangun maka dapat ditunjukkan bukti bahwa kepariwisataan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Kebijakan dibidang kepariwisataan harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak lagi bersifat konvensional, yaitu hanya dalam kaitannya dengan produk wisata (yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas dan amenities). Isu ini harus dianggap meliputi segala aspek dibidang kebijakan publik yang terkait dengan kepariwisataan.

Sebagai contoh, pengelolaan sumber daya air pada umumnya menjadi bagian dari kepentingan wisatawan maupun penduduk lokal. Namun demikian, taman wisata tirta (*water park*), lapangan golf yang luas, dan infrastruktur kepariwisataan lainnya dapat mengkonsumsi sumber daya air dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu instansi lingkungan birokrasi yang mengelola sumber daya tersebut akan mempertimbangkan kepentingan kedua pihak terkait. Kebijakan yang sifatnya terintegrasi tersebut menjadi faktor penentu kepariwisataan yang berprinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut gagal diwujudkan, maka akan terjadi berbagai persoalan yang tidak menghasilkan pembangunan kepariwisataan berkualitas tinggi:

“understanding both positive and negative impacts will lead to practical sustainable tourism development. When the negative impacts on the environment are recognized, corrected, and managed well and the positive attributes are built up, the results can be presented to stakeholders and tourism can become an important driving force in community development...Included in this policy process should be a listing of the quality, quantity, and geographic distribution of the tourism superstructure and special events, such as festival...policy issues should be extended beyond those traditionally thought of tourism, to be inclusive of all public programs concerned with tourism, not just what is typically perceived as tourism products. For instance, water management issues usually concern local businesses and residents. However, water parks, large golf resorts, and other tourism infrastructure can consume vast quantities of water. Therefore, waterworks departments will want to consider both the tourism industry and the local residents when developing policy. This will be crucial for tourism’s long-term success in a community... Therefore, it is important to have an integrated policy. Without a comprehensive tourism policy, tourism’s economic, political and legal implications often have unguided results, which may not lead to high-quality tourism development.”

Dengan demikian ditinjau dari aspek kebutuhan praktis dalam rangka membuat kebijakan di lingkungan birokrasi, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal penting yang seharusnya menjadi perhatian serius para birokrat baik di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintahan daerah. **Pertama**, kepariwisataan tidak sekedar merupakan masalah sederhana yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Kepariwisataan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang sifatnya strategis, sehingga diperlukan suatu kebijakan dengan pendekatan yang bersifat holistik dan dilaksanakan secara konsisten.

Kedua, sebagai besar kebijakan di bidang kepariwisataan menyangkut masalah penyusunan dan penegakan peraturan perundangan, oleh karena itu pemahaman mengenai hukum dan implementasi hukum seharusnya menjadi salah satu prioritas perhatian birokrasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berbasis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. *Ketiga*, keberhasilan kepariwisataan dimasa depan sangat bergantung pada kualitas kebijaksanaan di bidang kepariwisataan pada hari ini.

1.3 Konsep Sinergitas

Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator dalam menganalisis sinergitas menurut pendapat doctoroff meliputi indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, serta kreativitas antar pihak terkait yang menjadi syarat utama bagi sebuah sistem sinergi yang ideal

Sofyandi & Garniwa dalam Rahmawati dkk (2014:643) mengemukakan bahwa Sinergitas dapat terbangun dengan baik melalui dua cara diantaranya

1. Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang memandang bahwa komunikasi sebagai kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, dan komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.
2. Koordinasi
Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Dalam hal ini Silalahi dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan koordinasi

sebagai bentuk integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam sebuah usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Moekijat dalam Rahmawati dkk (2014:643) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) syarat utama dalam mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

- 1 Hubungan langsung yang akan mempermudah pencapaian melalui hubungan pribadi secara langsung
- 2 Kesempatan awal dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
- 3 Kontinuitas koordinasi yang harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan
- 4 Dinamisme, koordinasi harus terus menerus
- 5 Tujuan yang jelas untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6 Organisasi yang sederhana untuk memudahkan koordinasi yang efektif.
- 7 Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang akan mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan serta membantu dalam hal pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8 Komunikasi yang efektif
- 9 Kepemimpinan supervisi yang efektif yang akan menjamin koordinasi kegiatan baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat evaluasi.

Sinergitas dalam pencapaian tujuan dapat terlaksana melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Konsep sinergitas merupakan upaya yang harus dilakukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan maupun non pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

1.4 Konsep Model Pentahelix

Model pentahelix pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan, memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran pengusaha, pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media.

Kotler et al dalam Saputri (2020:24) menyatakan bahwa destinasi wisata akan mendapatkan sebuah keunggulan dalam bersaing apabila masing-masing dari organisasi yang terlibat dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya lain yang dapat mendukung proses pengembangan pariwisata. Dalam hal ini model pentahelix berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

1.5 Peran Aktor Pentahelix

Pengelolaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran stakeholder dalam proses pengembangannya. Terdapat 5 (lima) aktor yang ikut berkontribusi secara aktif dalam proses pengembangan sektor pariwisata, diantaranya

a. Pemerintah

Dalam proses pengembangan sektor pariwisata, pemerintah berperan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung perkembangan pariwisata, menyiapkan kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, memberikan fasilitas yang memadai dan melakukan kegiatan promosi serta pemasaran destinasi wisata tersebut. Peran pemerintah dalam pembuat kebijakan maupun regulasi dibidang pariwisata akan mempengaruhi proses pengembangan pariwisata

tersebut. Pemerintah juga berperan secara langsung didalam pengembangan regulasi dibidang pariwisata, mengendalikan proses pengembangan pariwisata, serta berperan langsung dalam memperkuat kelembagaan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan kebijakan atau regulasi.

b. Akademisi

Akademisi dalam proses pengembangan pariwisata berperan dengan melakukan kajian ilmiah serta berbagai riset dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah. Hasil dari kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan para akademisi dapat dimanfaatkan untuk penunjang keberhasilan sektor pariwisata dengan melakukan kerjasama serta komunikasi dengan para akademisi dalam proses pengembangan agrowisata.

c. Dunia usaha

Dalam proses pengembangan pariwisata, dunia usaha atau swasta berperan penting dalam penyelenggaraan bisnis disektor pariwisata yang mengutamakan etika bisnis, profesional, bertanggung jawab serta berkelanjutan. Dunia usaha berperan sebagai *profit oriented* yang akan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang sangat penting dalam sektor pariwisata.

d. Komunitas

Komunitas dalam proses pengembangan pariwisata terdiri dari masyarakat dan LSM atau NGO yang berperan mendukung sapta pesona dengan menyediakan jasa pariwisata atau ekonomi kreatif. Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pengembangan pariwisata.

e. Media

Media berperan pada bidang informasi dan promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran bidang pariwisata yang bersifat inklusif dengan memanfaatkan media sosial.

1.6 Pariwisata Kampong Kopi Sebagai Obyek Studi, Sistem dan Sosial Budaya

Sebagai aktivitas yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, pariwisata banyak menarik minat akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkajinya. **Jovicic** (1997, dalam **Richardson** dan **Fluker**, 2004) mengusulkan agenda kajian pariwisata dikembangkan sebagai disiplin tersendiri, yang disebut *Tourismology*. Hal ini didasarkan alasan bahwa pariwisata sebagai fenomena kompleks tidak dapat dipahami secara komprehensif dengan menggunakan berbagai perspektif disiplin ilmu yang ada sekarang. Pengembangan *Tourismology* akan memberi peluang lebih baik untuk mengkaji berbagai masalah kepariwisataan sebagai suatu composite phenomena.

Leiper (1995) mendukung pengembangan pariwisata sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri dengan menyebut *tourismologi* sebagai *tourism discipline*.

Menggunakan pendekatan epistemologi, ontologi, dan aksiologi, pariwisata sama seperti cabang ilmu lain, sehingga dapat disebut sebagai ilmu tersendiri. Banyak kajian yang dilakukan pariwisata, secara empiris dan teoretis. Pariwisata adalah institusi sosial yang penting dalam kehidupan modern, yang dapat dipelajari. Pariwisata mempunyai sejarah dan *literature*, mempunyai struktur internal dengan prinsip operasinya, dan sangat sensitif terhadap pengaruh eksternal baik kejadian alam maupun budaya, semua dapat dianalisis.

Atas pengkajian terhadap aspek kepariwisataan, kemudian pariwisata semakin berkembang dari berbagai disiplin ilmu yang sudah “mapan”, cabang yang menekuni pariwisata seperti Geografi Pariwisata, Psikologi Pariwisata, Ekonomi Pariwisata, Sosiologi Pariwisata, Antropolgi pariwisata, dan lainnya.

1.7 Wisatawan dan Pariwisata

Pariwisata berkembang karena ada gerakan manusia dalam mencari suatu

yang belum diketahui, menjelajah wilayah baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru (**Robinson**, 1976; **Murphy**, 1985). Pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia, ditandai adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama serta lainnya. Sebagai fenomena modern, tonggak bersejarah dalam pariwisata dapat ditelusuri dari perjalanan **Marcopolo** (tahun 1254-1324) yang menjelajah Eropa, sampai Tiongkok, kemudian kembali ke Venesia, selanjutnya disusul perjalanan **Pangeran Henry** (1394-1460), **Cristopher Columbus** (tahun 1451-1506), dan **Vas Co da Gama** (akhir abad XV). Namun, sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada awal abad 19, dan sebagai industri internasional, pariwisata dimulai tahun 1869 (**Crick**, 1989, **Graburn dan Jafari**, 1991).

Dewasa ini pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Pariwisata cukup menjanjikan sebagai primadona “ekspor”, karena bebrapa ciri positifnya. Dalam suasana terjadi kelesuan perdagangan komunitas, pariwisata tetap mampu menunjukan *trend* yang meningkat terus. Data perkembangan pariwisata didunia menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis minyak tahun 1970-an, maupun pada saat terjadinya resesi dunia awal tahun 1980-an, pariwisata tetap maju, baik dilihat dari jumlah wisatawan internasional maupun penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Dalam periode 1984-1992, penerimaan berbagai negara dari industri tanpa asap ini mengalami pelonjakkan cukup tajam, sebagaimana dilihat dari data statistik negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). (1994; **Pitana**, 1999).

Bagi Indonesia dapat ditelusuri kembali kepada dasawarsa awal abad ke-20 (tepatnya pada tahun 1910, yang ditandai dengan dibentuknya VTV (*Vereeniging Toeristen Verkeer*), Badan Pariwisata Belanda, berkedudukan di Batavia. Badan pemerintah ini sekaligus bertindak sebagai *tour operator dan travel agent*, yang secara gencar mempromosikan Indonesia (khususnya Jawa, kemudian Bali). Tahun 1926 berdiri di Jakarta sebuah cabang dari Lisind (*Lissonne Lindeman*) yang tahun 1928 berubah menjadi Nitour (*Nederlandsche Indische Touristen Bureau*), sebagai anak perusahaan dari perusahaan pelayaran Belanda (KPM). KPM secara rutin melayani pelayaran yang menghubungkan Batavia, Surabaya, Bali dan Makassar,

dengan mengangkut wisatawan (**Spillane**, 1989; **Vickers**, 1989).

Setelah Indonesia merdeka, tahun 1946, pemerintah membentuk HONET (*Hotel National and Tourism*), badan yang bertugas menghidupkan kembali pariwisata, khususnya menangani perusahaan Belanda. Tahun 1955 Natour dan YTI (Yayasan Tourisme Indonesia). Dengan usaha keras, badan ini berhasil mengangkat pariwisata Indonesia, sehingga sempat terjadi “demam pariwisata” beberapa tahun lamanya. Kongres 1 YTI, 12-14 Januari 1957 (disebut Munas Tourisme I) melahirkan Dewan Tourisme Indonesia (DTI). Istilah *pariwisata* lahir terakhir, pada waktu Munas Tourisme II di Tretes, Jatim, 12-14 Juni 1958, dimana pariwisata diartikan sebagai *international tourism*, untuk *domestic tourism* dipopulerkan dengan istilah dharma wisata.

Indonesia sangat menaruh harapan pada pariwisata sebagai “komoditas ekspor” yang diharapkan mampu menggantikan peran migas. Harapan ini cukup beralasan, karena Indonesia memiliki potensi. Meskipun pariwisata telah lama menjadi, perhatian baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, samapai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu wisatawan dan pariwisata.

Kata “wisata” (*tour*) secara harfiah dalam kamus berarti; *perjalanan dimana si pelaku kembali ketempat awalnya; perjalanan sirkuler yang dilakukan untuk tujuan bisnis, bersenang-senang, atau pendidikan, pada berbagai tempat dikunjungi dan biasanya menggunakan jadwal perjalanan terencana.* (**Murphy**, 1958: 4-5).

Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan/**tourist**. Balasan wisatawan juga bervariasi, mulai dari yang umum sampai dengan yang sangat teknis spesifik. *United Nation Conference on Travel and Tourism* di Roma (1963) memberi batasan lebih umum, tetapi menggunakan istilah *visitor* (pengunjung), yaitu:

“*Setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan merupakan tempat tinggalnya, untuk berbagai tujuan, tetapi bukan untuk mencari pekerjaan atau kehidupan dari negara yang dikunjungi*”. Batasan ini juga digunakan oleh IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) sejak tahun 1968. Batasan ini sebenarnya hanya berlaku untuk wisatawan internasional, tetapi secara analogis bisa juga diberlakukan untuk wisatawan domestik, dengan membagi

negara atas daerah (provinsi). Selanjutnya visitor dibedakan atas dua, yakni: 1. Wisatawan (*tourist*) mereka yang mengunjungi suatu daerah lebih dari 24 jam, 2. Pelancong/pengunjung (*excursionist*), yaitu mereka yang tinggal ditujuan wisata kurang dari 24 jam.

Batasan tentang wisatawan juga diberikan **Leiper** (1995; 11) mengatakan: *“Tourist can be defined in behavioural terms as persons who travel away from their normal residential region for a temporary period of at least one night, to the extent that their behavior involves as search for leisure experiences from interactions with features or characteristics of places they choose to visit”*.

Dari definisi wisatawan, maka berkembang definisi parawisata, yang sangat bervariasi antar ahli. **Macintosh** (1980; 28) menyebut bahwa parawisata adalah: *“The sum of phenomena and relationships arising from the interaction of tourists, businesses, hostgovernment, and communities, in the process of attracting and hosting these tourists and other visitors”*.

Jafari (1977; 28) mengutarakan secara akademis, studi tentang parawisata adalah:

“studi tentang manusia yang berwisata dengan berbagai implikasinya. Studi tentang pariwisata adalah:

“The study of man away from his usual habitat, of the industry which responds to his needs, and the impacts that both he and the industry have on the host’s socio cultural, economic and physical environment”.

Definisi diberikan **Weaver** dan **Opperman** (2000:3), mengemukakan batasan:

“Tourism is the sum total of the phenomena and relationship arising from the interaction among tourist, business suppliers, host governments, host communities, origin governments, universities community colleges nongovernmental organizations, in the process of attracting, transporting, hosting, and managing these tourists and other visitors”.

Menurut **Murphy** (1985), pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan tidak permanen. Hal ini mirip dengan batasan yang diberikan **Fennel** (1994: 4).

“Tourism is defined as the interrelated system that includes tourists and the associated services that are provided and utilized (facilities, attractions, transportation, and accomodation) to aid in their movement”.

Batasan termaksud begitu luas, sehingga pengertian pariwisata seakan tidak bisa “dibatasi”, karena menyangkut hampir semua aspek kehidupan. Begitu luasnya sampai ada yang mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah pariwisata, *tourism is everything and everything is tourism* (**Ian Munt**, 1994: 104). Dalam definisi yang *tautologies*, dijelaskan bahwa:

“Tourism becomes absolutely everything associabel with acts of tourists, or to put into its proper tautological form, ‘tourism is tourism’ or ‘tourism is what tourists do’. (**Franklin**, 2003:28).

Pemberian batasan tentang pariwisata, sebagaimana juga dengan berbagai subjek lain, sering tidak dapat menghasilkan suatu batasan memuaskan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam *The Economic*, yang dikutip pada awal tulisan ini. Melihat batasan luas dan beragam. **Richardons** dan **Fluker** (2004) membedakan batasan pariwisata menjadi dua yaitu: 1. Batasan konseptual digunakan untuk memahami pariwisata secara konseptual dan pemahaman akademi, 2. Batasan teknis, digunakan untuk kepentingan pengumpulan statistik. Batasan teknis diberikan oleh *The World Orgasation* (WTO), bahwa:

“Tourism comprises the activities of persons, travellingto and staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose”. (1995, dikutip dari **Richardson** dan **Fluker** 2004:7).

Meskipun ada variasi batasan mengenai pariwisata, ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam memberi batasan mengenai pariwisata (khususnya pariwisata Internasional):

1. *Traveller*. Orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.
2. *Visitor*. Orang yang melakukan perjalanan, kedaerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanannya bukan untuk terlibat dalam kegiatan mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan ditempat tujuan.
3. *Touris*. Bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak 1 malam (24 jam) didaerah yang dikunjungi. (WTO, 1995).

Semua definisi pariwisata yang dikemukakan, meskipun berbeda dalam penekanan, selalu mengandung ciri pokok yaitu:

1. Adanya unsur *travel* (perjalanan): pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya.
2. Adanya unsur “Tinggal Semetara” ditempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya.
3. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari penghidupan/pekerjaan di tempat yang dituju. (**Richardson dan Fluker**, 2004:5).

1.8 Gambaran Umum Isi Buku

Uraian buku ini menemukan titik kompromi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata kampoeng kopi Tepatnya sinergitas antar aktor dalam pembangunan pariwisata kampoeng kopi melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya dan bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Barat

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari empat bab (selain *pendahuluan*), yaitu

bab ke dua berisi Kerangka Dasar Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kampoeng kopi dan juga di lengkapi teori mendasar tentang kebijakan pemberdayaan, dan mengelaborasi beberapa studi pendahuluan yang digunakan sebagai basis dalam memahami perspektif kebijakan pembangunan kepariwisataan kampoeng kopi

Dalam konteks kajian penelitian dalam buku ini yang dimaksud dengan sinergitas pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat

promosi objek wisata tersebut. Data di peroleh berdasarkan hasil kajian lapang, bahwa *dalam bidang pariwisata, pentingnya* sinergitas pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

Bab ke tiga, gambaran umum lokasi penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Bab ke empat Sinergitas Pembangunan Pariwisata Kampoeng Kopi, yakni Sinergitas aktor-aktor pentahelix dalam pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi merupakan keselarasan sistem dan hubungan antar aktor Pentahelix untuk mencapai situasi yang kondusif bagi pembangunan inklusif pada Agrowisata Kampoeng Kopi Riris Jaya. Dalam pengembangan pariwisata berbasis agrowisata kampoeng kopi ini, tentunya tidak terlepas dari peran para *stakeholder* dalam proses pengembangannya. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi ini diantaranya 1) Dinas kepemudaan, Olahraga dan proses pengembangannya. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi ini diantaranya 1) Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2) Badan Penelitian Dan Pengembangan, 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 4) Dinas Perkebunan dan Peternakan, 5) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 6) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 7) Dinas Koperasi dan Perdagangan, 8) Bank Lampung, 9) PLN, 10) Universitas Lampung, 11) Akademi Pariwisata, dan 12) Institut Teknologi Sumatera.

Bab ke lima merupakan bagian akhir dari buku ini berisi kata-kata penutup (*closing statement*), sebagai rangkuman dari keseluruhan uraian dari buku. Pada bab ini juga dikemukakan rekomendasi dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan

Daftar Pustaka

Antariksa, Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang: Intrans Publishing

Aprillia, Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung ; Alfabeta

Sedarmayanti, 2014 *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata* (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)

Cahyadi, Hery Sigit. 2019. *Perencanaan Pariwisata, Merencanakan Pariwisata Secara Komprehensif Dan Terpadu*. Explore, Yogyakarta, .

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perencanaan Dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Suluh Media, 2018.

2 KERANGKA DASAR KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KAMPOENG KOPI

Strategi dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses pembangunan yang sedang berlangsung. Strategi dalam pembangunan inklusif akan memberikan arahan jangka panjang mengenai kemiskinan dan ketimpangan sosial, dimana didalamnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan solusi serta pencegahan ketidakmerataan pembangunan dari permasalahan yang ada. Strategi akan membantu seluruh pihak yang terkait untuk mampu beradaptasi serta mampu memecahkan permasalahan yang timbul akibat dari pembangunan tersebut. Dalam hal ini, seluruh pihak akan mampu mengatasi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Titik solidaritas dalam pembangunan inklusif akan menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan inklusif membutuhkan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat. Dalam pembangunan inklusif solidaritas antar pihak terkait akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Jika dalam pembangunan tersebut terjalin solidaritas yang baik maka tujuan dari pembangunan tersebut akan tercapai dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, namun jika solidaritas dalam pembangunan berjalan tidak semestinya maka tujuan yang telah direncanakan tidak akan tercapai.

Saat ini sektor pariwisata menjadi penyumbang anggaran yang cukup besar dan turut meningkatkan perekonomian negara. Sektor pariwisata secara tidak langsung akan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dengan tersedianya lapangan pekerjaan maka kesejahteraan masyarakat pun perlahan akan meningkat. Perkembangan agrowisata merupakan alternatif peningkatan pendapatan masyarakat dengan menggali potensi ekonomi petani sekaligus memperkenalkan wilayah tersebut kepada wisatawan baik lokal maupun

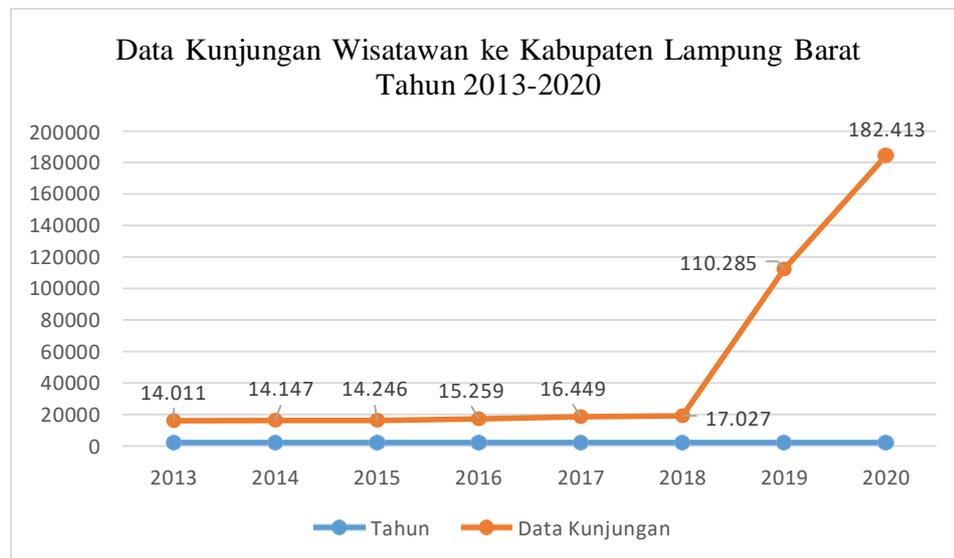
mancanegara. Pengembangan pariwisata berbasis pertanian secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada saat ini. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata berbasis pertanian akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan agrowisata maupun terhadap masyarakat sekitar.

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah penghasil serta penyumbang kopi terbesar di Provinsi Lampung, dengan luas area lahan kopi sekitar 53.606 hektar dengan jumlah produksi pertahun mencapai 52.644,9 ton. Kabupaten Lampung Barat juga merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi dengan pemandangan alamnya yang indah sebagai daya tarik wisatawan untuk datang berkunjung ke Kabupaten Lampung Barat.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031. Tujuan dari peraturan ini yaitu 1) Mengintegrasikan pembangunan kawasan pariwisata daerah dengan arahan tata ruang serta pembangunan infrastruktur daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan; 2) Menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan produk pariwisata; 3) Memantapkan potensi alam dan budaya masyarakat sebagai bagian dari identitas pariwisata daerah; 4) Mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, serta komunikatif sehingga diharapkan nantinya akan mampu memperkuat citra daerah sebagai kabupaten kreatif; 5) Memperkuat sistem industri pariwisata daerah melalui pembangunan industri kreatif berbasis masyarakat;

6) Membangun sistem kelembagaan pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri akan mampu mengendalikan pembangunan pariwisata sekaligus menarik minat para investor untuk mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan; serta 7) Mengembangkan struktur pemerintah dan sistem pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan

Gambar 1. Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lampung Barat 2013 -2020.



Sumber: Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

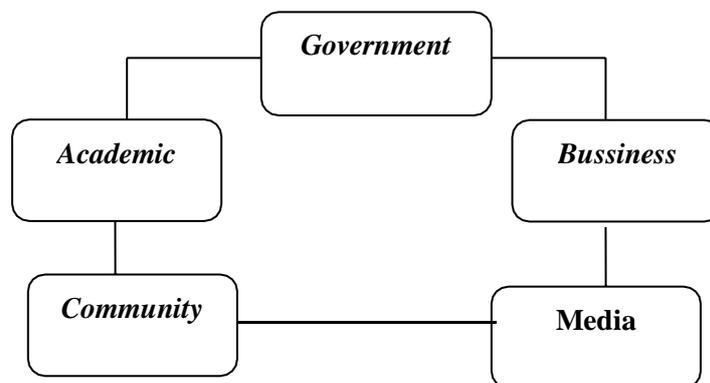
Salah satu sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Lampung Barat yaitu Agrowisata Kampoeng Kopi yang merupakan lokasi pariwisata yang berfungsi pula sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang pengelolaan kopi mulai dari proses pembibitan hingga proses siap konsumsi

Pembangunan Agrowisata Kampoeng Kopi tidak terlepas dari peran *stakeholder* dalam proses pengembangannya. Dalam hal ini *stakeholder* merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan pariwisata yang ada di Pekon Rigis Jaya dengan menerapkan konsep pembangunan inklusif pada Agrowisata Kampoeng Kopi yang ada di Rigis Jaya tersebut. Belum optimalnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah untuk lebih meningkatkan pembangunan pariwisata yang ada. Saat ini objek wisata yang telah dikelola hanya 32 objek wisata dari 77 objek wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Dalam hal ini, Pentahelix merupakan bagian dari pemangku

kepentingan (*stakeholder*) atau mereka yang terkait dalam mengembangkan pariwisata daerah.

Dalam pengembangan agrowisata, kolaborasi Pentahelix dianggap mampu mengembangkan pariwisata yang ada di suatu daerah. Model Pentahelix tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Peraturan ini menyebutkan bahwa dalam rangka menciptakan proses bisnis dan menjamin kualitas kegiatan, fasilitas, layanan serta menciptakan pengalaman dan manfaat wisata guna membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, perlu dilakukan optimalisasi kepariwisataan melalui peran *Academic, Bussiness, Community, Government, And Media* (ABCGM). Pentahelix dipandang sebagai unsur yang memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke agrowisata kampoeng kopi yang diharapkan akan memperkuat sinergi untuk mendorong program pemerintah pusat maupun daerah melalui pengelolaan (manajemen) destinasi wisata.

Gambar 2. Unsur dalam Model Pentahelix.



Sinergitas aktor-aktor pentahelix dalam pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi merupakan keselarasan sistem dan hubungan antar aktor Pentahelix untuk mencapai situasi yang kondusif bagi pembangunan inklusif pada Agrowisata Kampoeng Kopi Rigin Jaya. Dalam pengembangan pariwisata berbasis agrowisata kampoeng kopi ini, tentunya tidak terlepas dari peran para *stakeholder* dalam proses pengembangannya. Aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi ini diantaranya 1) Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2) Badan Penelitian Dan Pengembangan, 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 4) Dinas Perkebunan dan Peternakan, 5) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 6) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 7) Dinas Koperasi dan Perdagangan, 8) Bank Lampung, 9) PLN, 10) Universitas Lampung, 11) Akademi Pariwisata, dan 12) Institut Teknologi Sumatera.

Pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi merupakan wujud kepedulian Pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (PDT). Dalam hal ini, beberapa daerah di Kabupaten Lampung Barat masih termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal, salah satu pekon yang masuk ke dalam kategori daerah tertinggal yaitu Pekon Rigin Jaya, Kecamatan Air Hitam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menjelaskan bahwa daerah tertinggal merupakan daerah yang memiliki wilayah ataupun masyarakatnya mengalami keterlambatan dalam berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah tertinggal merupakan daerah yang secara umum memiliki karakteristik dibawah ketentuan, baik dalam hal sumber daya manusia yang rendah, maupun infrastruktur serta akses layanan dasar yang belum memenuhi kriteria dalam skala nasional. Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016, disebutkan bahwa terdapat 6 kriteria dasar dalam menentukan daerah tertinggal, diantaranya 1) Perekonomian masyarakat, 2) Sumber daya manusia, 3) Infrastruktur yang meliputi sarana dan prasarana yang memadai, 4) Kemampuan keuangan daerah, 5) Aksesabilitas, dan 6) Karakteristik daerah.

Dalam rangka pengembangan daerah tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mengalokasikan dana untuk program pembangunan bidang agrowisata dan pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Lampung Barat. Implementasi program pembangunan bidang agrowisata dan pengembangan ekonomi lokal untuk kategori desa tertinggal akan berfokus pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas kopi di dalam kawasan Agrowisata Kampoeng Kopi. Dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi ini, keterlibatan dari aktor-aktor pentahelix sangat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan inklusif pada sektor pariwisata tersebut. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan pembangunan inklusif akan memberikan dampak positif yang cukup signifikan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang masyarakat tersebut.

Sinergitas aktor Pentahelix dalam pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi sangat dibutuhkan guna meningkatkan kunjungan wisatawan serta turut serta dalam pengelolaan agrowisata tersebut. Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, kolaborasi antar aktor pentahelix akan saling berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini, Pemerintah berperan sebagai pengawas serta pembinaan, bisnis berperan dibidang usaha serta lapangan pekerjaan, akademisi akan berperan dalam kajian ilmiah serta pelatihan, kemudian komunitas berperan di bidang sosial serta media yang berperan dalam mempromosikan objek wisata tersebut kepada masyarakat luas.

Aktor-aktor Pentahelix memiliki peran yang sangat krusial didalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi Rigis Jaya untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan kemampuan Masyarakat sekitar untuk berkolaborasi dalam proses pengembangan agrowisata. Kolaborasi aktor Pentahelix diharapkan akan mendukung tujuan inovasi bersama dan turut berkontribusi pada kemajuan sosial ekonomi di pekan Rigis Jaya. Jika seluruh aktor pentahelix dapat berkolaborasi dengan baik dalam pengembangan agrowisata tersebut, maka diharapkan akan meningkatkan kualitas Agrowisata Kampoeng Kopi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah

kunjungan ke Kampoeng Kopi Rigin Jaya yang secara tidak langsung akan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Pekon Rigis Jaya

3.1.1 Profil Desa Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat

Pekon Rigis Jaya terletak di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Awalnya Pekon Rigis Jaya merupakan pemekaran dari Pekon Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Pekon Rigis Jaya ini memiliki 4 Pemangku atau Dusun yang terdiri dari Pemangku Atar Obar, Pemangku Wana Jaya, Pemangku Buluh Kapur, dan Pemangku Rejo Sari yang memiliki kurang lebih 215 kepala keluarga dan tersebar di 4 Pemangku yang ada di Pekon Rigis Jaya. Masyarakat di Pekon Rigis Jaya mayoritas merupakan petani kopi yang merupakan komoditas unggulan di Pekon Rigis Jaya, sekaligus komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 1. Pemangku Rigis Jaya

No	Nama Pemangku atau Dusun	Kepala Pemangku atau Dusun
1.	Pemangku Atar Obar	Anam
2.	Pemangku Wana Jaya	Budi Utomo
3.	Pemangku Buluh Kapur	Tasrudin
4.	Pemangku Rejo Sari	Zainudin

Pekon Rigis Jaya memiliki luas wilayah seluas 1.158.83 Ha yang terbagi kedalam beberapa wilayah, diantaranya pembagian wilayah Tanah Marga seluas

582.65 Ha, dan Kawasan Hutan Lindung seluas 576.19 Ha. Dusun Rejo Sari ditetapkan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan yang ada di Pekon Rigis Jaya, dengan pembagian wilayah pada Pekon Rigis Jaya Sebelah Utara berbatasan langsung dengan kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45B, Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Way Besai dan berbatasan langsung dengan Pekon Gunung Terang, Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Pekon Semarang Jaya serta Sebelah Timur berbatasan langsung dengan sungai kecil dan berbatasan langsung dengan Pekon Gedung Surian.

Lokasi Pekon Rigis Jaya dengan Ibu Kota Kecamatan berjarak 6 km, Pekon Rigis Jaya dengan Ibu Kota Kabupaten berjarak 65 km , dan Pekon Rigis Jaya dengan Ibu Kota Provinsi berjarak 200 km. Wilayah Rigis Jaya umumnya berbentuk gelombang atau perbukitan dengan ketinggian rata-rata mencapai 850-950 mdpl. Suhu rata-rata tiap tahun dipekon rigis jaya berkisar antara 20-25⁰ C , dengan rata-rata curah hujan tiap tahun mencapai 2.000-3.000 mm.

Pekon Rigis Jaya memiliki luas wilayah 582,65 hektar yang terdiri dari 576,22 hektar kawasan hutan dan total keseluruhan lahan yaitu 1.158.83 hektar. Pembagian wilayah yang ada di pekon Rigis Jaya meliputi :

1. Pemukiman : 17,49 hektar
2. Perkebunan : 4.49,34 hektar
3. Sawah : 30,06 hektar
4. Palawija : 1,13 hektar
5. Kolam : 2,13 hektar
6. Peternakan : 0,25 hektar
7. Rawa : 4,06 hektar
8. Galian C : 0,21 hektar
9. Dam irigasi : 0,04 hektar
10. Ekowisata : 0,05 hektar
11. Semak belukar : 16,0 hektar
12. Sarana ibadah : 0,37 hektar
13. Sarana pemerintahan desa : 0,07 hektar
14. Sarana umum : 0,02 hektar

15. Tempat pemakaman umum : 0,12 hektar
16. Hutan kemasyarakatan : 306,19 hektar
17. Hutan lindung : 270,03 hektar
18. Infrastruktur jalan : 11,43 hektar

3.1.2 Sejarah Pekon Rigis Jaya

Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam awalnya merupakan wilayah hasil pemekaran dari Pekon Gunung Terang. Pada awalnya tanggal 07 Februari 2010, masyarakat Pekon Rigis Jaya yang diwakili oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan para sesepuh dari 3 (tiga) pemangku atau dusun tersebut melakukan musyawarah besar dengan hasil musyawarah tersebut yaitu sepakat dan menyetujui pendirian Pekon yang diberi nama Rigis Jaya. Pekon Rigis Jaya bermakna bergerigi, yang diambil dari nama perbukitan yang bergerigi yang terbentang luas disekeliling Pekon Rigis Jaya tersebut. Pekon Rigis Jaya diresmikan oleh Bupati Lampung Barat pada tanggal 11 Mei 2010. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2010 diadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat yang menyepakati pemekaran pemangku dari sebelumnya 3 (tiga) pemangku menjadi 4 (empat) pemangku yaitu Pemangku Atar Obar, Pemangku Wana Jaya, Pemangku Buluh Kapur dan Pemangku Rejosari.

3.1.3 Visi dan Misi Pekon Rigis Jaya

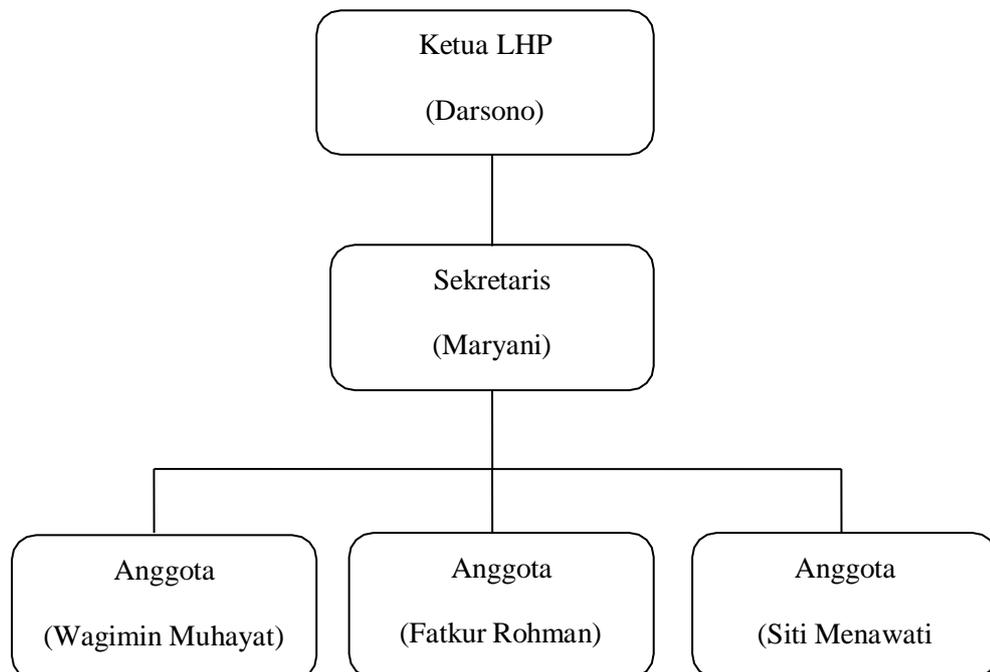
Visi dan Misi Pekon Rigis Jaya yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Pekon Rigis Jaya yang Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo**”. Gemah Ripah Loh Jinawi mengandung arti murah sandang murah pangan subur makmur yang merupakan modal utama untuk meraih tujuan hidup yaitu sejahtera. Sedangkan Toto Tentrem Kerto Raharjo mengandung arti tertata tentram dan bermartabat merupakan modal utama untuk mencapai tujuan hidup, masyarakat yang tentram dan bermartabat akan mudah meraih cita-cita hidup serta tidak

gampang terpengaruh hal-hal yang negatif dengan melahirkan gagasan yang cemerlang untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera.

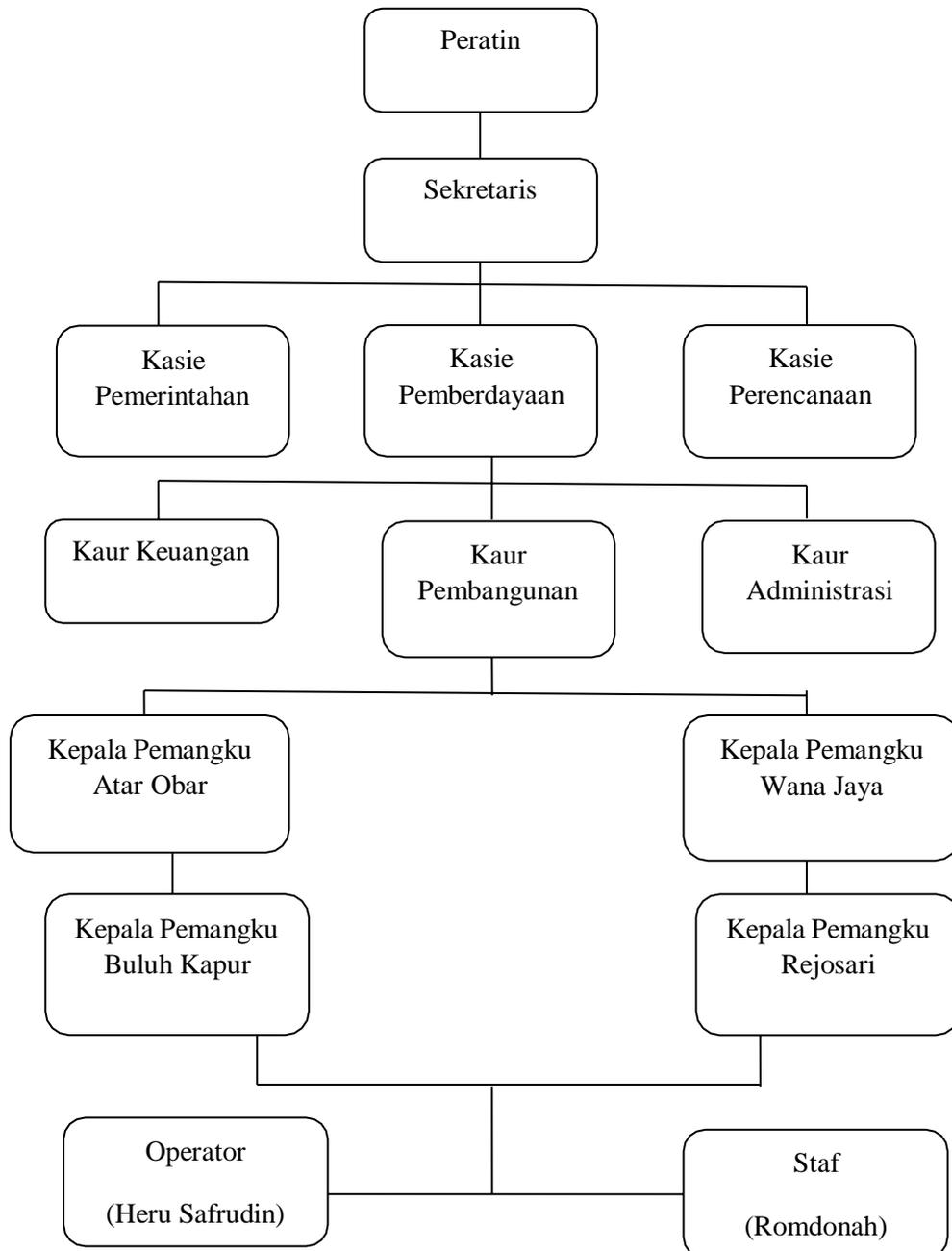
3.1.4 Struktur Organisasi Pekon Rigis Jaya

Struktur organisasi merupakan sistem yang digunakan kelembagaan yang ada dalam sebuah organisasi yang mendefinisikan peran dan fungsi dari masing-masing anggota dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi berperan penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dan memungkinkan pertumbuhan yang signifikan pada organisasi tersebut dimasa yang akan datang. Struktur organisasi dibentuk untuk memastikan tujuan dan tanggungjawab dalam organisasi tersebut diberikan kepada orang yang tepat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Gambar 3. Struktur LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Pekon Rigis Jaya.



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Gambar 4. Struktur Aparat Pekon Rigis Jaya.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

3.1.5 Kependudukan Pekon Rigis Jaya

Pekon Rigis Jaya terdiri dari 215 Kepala Keluarga yang tersebar pada 4 Pemangku yaitu Pemangku Atar Obar, Pemangku Wana Jaya, Pemangku Buluh Kapur, Serta Pemangku Rejosari. Kepala keluarga tersebut terbagi menjadi 5 (lima) golongan, diantaranya 67 kepala keluarga tergolong sebagai keluarga prasejahtera, 47 kepala keluarga tergolong sebagai keluarga sejahtera tingkat 1 (satu), 40 kepala keluarga tergolong sebagai keluarga sejahtera tingkat 2 (dua), 27 kepala keluarga tergolong sebagai keluarga sejahtera 3 (tiga), serta 34 kepala keluarga tergolong keluarga sejahtera 4 (empat). Golongan tersebut dikelompokkan berdasarkan indikator perekonomian serta kesejahteraan masyarakat tersebut.

Tabel 2. Golongan Usia Masyarakat Pekon Rigis Jaya

No	Golongan Usia	Jumlah
1.	Usia 1- 15 tahun	293 orang
2.	Usia 16-30 tahun	267 orang
3.	Usia 31 tahun ke atas	235 orang
Jumlah		

Sumber: Diolah oleh peneliti,2021

Tabel 3. Jenjang Pendidikan Masyarakat Pekon Rigis Jaya

No	Jenjang Pendidikan Masyarakat	Jumlah
1.	Tidak tamat SD /sederajat	41 orang
2.	Tamat SD /sederajat	272 orang
3.	Tamat SLTP /sederajat	273 orang
4.	Tamat SLTA /sederajat	199 orang
5.	Tamat akademi/sederajat	6 orang
6.	Tamat perguruan tinggi	4 orang
Jumlah		795 orang

Sumber: Diolah oleh peneliti,2021

3.1.6 Gambaran Agrowisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya

Agrowisata Kampoeng Kopi terletak di Pekon Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Agrowisata Kampoeng Kopi berjarak kurang lebih 55 kilometer dari Kota Liwa yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Lampung Barat. Kampoeng Kopi Rigis Jaya merupakan kawasan penghasil kopi terbaik di

Kabupaten Lampung Barat yang menjadi sarana edukasi bagi wisatawan tentang budidaya komoditas unggulan Kabupaten Lampung Barat tersebut mulai dari proses pembibitan sampai dengan proses siap di konsumsi . Agrowisata Kampoeng Kopi telah dilengkapi dengan anjungan-anjungan dengan pemandangan hamparan perkebunan kopi yang luas sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Terdapat beberapa indikator penempatan serta pengembangan pariwisata berbasis agrowisata kampoeng kopi ditetapkan pada Pekon Rigis Jaya, indikator tersebut diantaranya:

1. Terdapat potensi sumber daya alam yang masih alami dengan suasana pedesaan yang menjadi daya tarik wisatawan
2. Letak pekan rigis jaya yang strategis dan berdekatan dengan jalan utama serta ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Keterbukaan masyarakat yang berapa di pekan rigis jaya dengan didukung oleh lembaga pemerintah pekan dan lembaga ekonomi masyarakat yang baik
4. Terdapat motivasi dibidang ekonomi dan sosial masyarakat pekan rigis jaya terhadap pengembangan pariwisata berbasis agrowisata kampoeng kopi tersebut
5. Terdapat pengembangan produk komoditas unggulan di pekan rigis jaya

Tujuan dari pengembangan agrowisata berbasis agrowisata kampoeng kopi yang terletak di Pekon Rigis Jaya diantaranya:

1. Menghadirkan berbagai fungsi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, serta pengembangan material
2. Perlindungan sumber daya alam serta perlindungan ekosistem perkebunan kopi yang menjadi komoditas unggulan di pekan rigis jaya

3. Upaya pelestarian kehidupan sosial dan pelestarian budaya masyarakat lokal
4. Upaya pengembangan sektor pariwisata yang berbasis agrowisata dengan sektor perkebunan sebagai ikon utama sektor pariwisata tersebut
5. Mendorong masyarakat setempat untuk berwirausaha dengan memanfaatkan potensi yang tersedia

4. SINERGITAS AKTOR PENTAHHELIX DALAM PENGEMBANGAN WISATA KAMPOENG KOPI

4.1.1 Sinergitas Aktor Pentahelix Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampong Kopi

Peran serta aktor pentahelix dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampong kopi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan yang ada. Pembinaan serta pengarahan masyarakat untuk turut berkontribusi dalam proses pembangunan merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh para aktor pentahelix. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia dalam proses pembangunan merupakan kunci utama pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan harapan atau tidak. Jika sumber daya manusia yang tersedia memiliki kompetensi yang memadai, maka proses pengembangan sektor pariwisata akan berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sinergitas para aktor pentahelix dilihat melalui indikator dari teori sinergitas yang dikemukakan oleh Sofyandi & Garniwa (2014) yang meliputi:

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai sebuah proses penyampaian ide, konsep, gagasan maupun informasi dari individu kepada individu lain. Komunikasi yang berorientasi pada sumber memandang bahwa komunikasi sebagai kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, dan komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

Komunikasi dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi cukup baik, yang dapat dilihat dari hubungan antar pihak terkait yang berjalan sesuai dengan tujuan. Para aktor pentahelix melakukan komunikasi antar pihak yang turut terlibat dalam proses pengembangan agrowisata kampoeng kopi secara virtual maupun secara tatap muka yang dilakukan dengan pengawasan dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini berdasarkan pada temuan dilapangan dan hasil wawancara kepada pihak-pihak terkait mengenai komunikasi yang dilakukan pada pengembangan agrowisata kampoeng kopi tersebut. Komunikasi yang terjalin pada seluruh aktor yang terlibat dalam pengelolaan agrowisata kampoeng kopi telah sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Sofyandi & Garniwa (2014) dengan tercapainya komunikasi yang terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

2. Koordinasi

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Dalam hal ini Silalahi mendefinisikan koordinasi sebagai bentuk integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam sebuah usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Koordinasi juga diartikan sebagai proses pengaturan dengan memadukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Koordinasi dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi belum berjalan secara optimal, sebab seluruh aktor pentahelix yang terlibat dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi cenderung berjalan dengan hanya melibatkan beberapa aktor saja dalam pelaksanaan program yang diimplementasikan guna meningkatkan agrowisata kampoeng kopi tersebut. Walaupun beberapa aktor sudah melakukan koordinasi dengan aktor-aktor lain, namun beberapa aktor pentahelix yang turut terlibat dalam proses pengembangan cenderung berjalan masing-masing. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan bahwa beberapa aktor-aktor pentahelix masih menjalankan program nya masing-masing dengan tidak melakukan kerjasama antar aktor pentahelix lain dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Koordinasi yang dikemukakan oleh

Sofyandi & Garniwa (2014) didefinisikan sebagai pengaturan dengan menyatukan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Mayoritas aktor-aktor pentahelix telah melakukan koordinasi yang baik dengan melakukan kerjasama dalam mengimplementasikan programnya guna mencapai tujuan yang diharapkan walaupun ada beberapa aktor yang belum melakukan koordinasi dengan baik.

Tabel 4. Matriks Sinergitas Aktor Pentahelix dalam Pengembangan Agrowisata Kampoeng Kopi

No	Indikator Sinergitas	Aktor Pentahelix
1.	Komunikasi	<p>1. Pemerintah</p> <p>Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan antar aktor pentahelix yang terjalin dengan baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemerintah melakukan komunikasi dengan baik antar pihak yang turut terlibat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi baik secara virtual maupun dengan tatap muka melalui diskusi antar pihak terkait.</p>
		<p>2. Akademisi</p> <p>Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, komunikasi yang dilakukan oleh akademisi telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan akademisi dengan aktor-aktor lain yang turut terlibat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi yang terjalin dengan baik dan menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.</p>
		<p>3. Komunitas</p> <p>Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, komunikasi yang dilakukan komunitas telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan hubungan antara komunitas dengan aktor pentahelix lain yang ikut berkontribusi dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi yang telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.</p>

		<p>4. Dunia usaha/Swasta Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, dunia usahaswasta telah melakukan komunikasi dengan baik antar aktor pentahelix yang turut berkontribusi dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi tersebut. Komunikasi yang dilakukan secara virtual dan tatap muka langsung melalui diskusi mengenai pengembangan agrowisata kampoeng kopi.</p>
		<p>5. Media Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, media telah melakukan komunikasi dengan baik antar aktor-aktor pentahelix yang berkontribusi dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi yang ditandai dengan keterlibatan media dalam diskusi antar pihak terkait baik secara virtual maupun secara tatap muka langsung yang membahas perkembangan agrowisata kampoeng kopi itu sendiri.</p>
2.	Koordinasi	<p>1. Pemerintah Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, koordinasi yang dilakukan pemerintah telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kerjasama antar pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi ini yang telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kampoeng kopi telah melakukan kerjasama dengan baik dalam mengimplementasikan program-program guna meningkatkan agrowisata kampoeng kopi serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.</p>
		<p>2. Akademisi Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, koordinasi yang dilakukan oleh akademisi belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan akademisi hanya melakukan koordinasi dengan masyarakat saja. Akademisi belum melakukan koordinasi antar aktor-aktor pentahelix lain seperti pemerintah, dunia usaha/swasta, media, maupun komunitas. Dalam hal ini akademisi belum menjalankan indikator ini dengan baik, sebab akademisi belum melakukan kerjasama antar aktor pentahelix dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi.</p>

		<p>3. Komunitas Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, komunitas telah menjalankan koordinasi dengan optimal antar aktor-aktor pentahelix. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi program-program yang dijalankan telah melibatkan akademisi, media dan masyarakat di Pekon Rigis Jaya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.</p>
		<p>4. Dunia usaha/Swasta Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, dunia usaha/swasta telah menjalankan koordinasi dengan baik antar pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Aktor ini telah melakukan kerjasama dengan baik antar aktor-aktor pentahelix dalam menjalankan program guna mencapai tujuan yang diharapkan.</p>
		<p>5. Media Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, media telah melakukan koordinasi dengan baik antar aktor pentahelix yang terlibat dalam pengembangan agrowisata tersebut. Media melakukan kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam mempromosikan agrowisata kampoeng kopi kepada masyarakat luas.</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

4.1.2 Pola Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampoeng Kopi

Pembangunan merupakan upaya melakukan perubahan di dalam seluruh aspek kehidupan. Pembangunan umumnya direncanakan secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan inklusif akan mendorong seluruh masyarakat untuk turut berkontribusi dalam menciptakan peluang, manfaat, serta menciptakan partisipasi dalam melakukan pengambilan keputusan. Pembangunan inklusif mengharuskan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan pariwisata, mulai dari perencanaan,

pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan, serta evaluasi pembangunan.

Pembangunan pariwisata mempunyai kontribusi yang cukup besar di dalam pembangunan nasional. Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar setelah sektor migas, hal ini tentunya menjadi peluang yang besar bagi pemerintah di masa mendatang untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai tumpuan dalam pembangunan nasional. Pengembangan sektor pariwisata di beberapa negara belum menjadi bagian penting di dalam rencana kerja pemerintahannya. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sektor pariwisata daerah menjadi penentu dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pariwisata

Faktor manusia merupakan komponen penentu dalam proses pembangunan. Pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengembangkan teknologi, sarana, dan prasarana untuk menjadi produktif. Alex Inkeles dan David H. Smith mengungkapkan bahwa dengan memberikan lingkungan dan pemahaman yang tepat, maka setiap individu dapat berubah menjadi yang lebih baik. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk mengembangkan individu menjadi lebih baik dimasa mendatang. Paradigma pembangunan inklusif akan mendorong tercapainya kerjasama yang dilakukan dalam sebuah proses pembangunan yang melibatkan kontribusi masyarakat di dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan inklusif pada sektor pariwisata mengedepankan peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sektor pariwisata dengan pemerataan manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang latarbelakang masyarakat tersebut.

Pengembangan sumber daya manusia akan menumbuhkan keinginan serta motivasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Proses tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, namun proses pengembangan sumber daya manusia akan mengalokasikan peranan dengan mengantarkan

subjeknya untuk menduduki posisi tertentu dalam tatanan sosial¹. Setelah adanya pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, masyarakat perlahan mulai memahami tentang pentingnya pengembangan sektor pariwisata terutama sektor agrowisata kampoeng kopi yang saat ini menjadi salah satu pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini menggunakan dua indikator pembangunan inklusif yang dikemukakan oleh Henny Warsilah (2016), diantaranya:

A. Inklusif Sosial

Terdapat beberapa indikator pembangunan inklusif sosial, diantaranya:

a. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memiliki peranan yang cukup signifikan, sebab keterlibatan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah proses pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata tidak hanya melibatkan pemerintah saja, namun juga melibatkan seluruh masyarakat dengan tidak memandang latar belakang masyarakat tersebut. Kesiapan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya akan mempengaruhi proses pembangunan dalam mencapai tujuan bersama.

Indikator ini telah tercapai dengan baik yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat di dalam proses pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Sebelum dikembangkannya agrowisata kampoeng kopi, masyarakat Pekon Rigis Jaya mayoritas pemahamannya belum terbuka dengan sektor pariwisata maupun tentang desa wisata. Namun setelah dikembangkannya agrowisata kampoeng kopi masyarakat Pekon Rigis Jaya perlahan mulai memahami tentang sektor pariwisata dan desa wisata yang merupakan sektor penunjang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan agrowisata kampoeng kopi merupakan langkah paling

penting, sebab sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pengembangan pariwisata yang ada disuatu daerah.

- b. Melibatkan seluruh entitas masyarakat (ras, etnik, golongan, dan agama).Keberagaman ras, etnis, golongan, dan agama masyarakat di indonesia merupakan hal yang tidak asing, sebab indonesia merupakan negara kepulauan dengan budaya yang beragam. Keberagaman suku bangsa di indonesia menjadikan kelebihan tersendiri, sebab keberagaman tersebut menjadikan identitas bangsa dan menjadi aset kekayaan negara. Begitu pula di pekan rigis jaya, keberagaman ras, etnis, golongan, dan agama tidak menjadikan masyarakat terpecah namun menjadikan ciri khas sendiri dan menjadi kekayaan budaya yang harus di lestarikan. Dalam pengembangan pariwisata tentunya tidak boleh memandang ras, entis, golongan, maupun agama tertentu. Justru keberagaman tersebut harus dijadikan acuan untuk menyatukan perbedaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Indikator yang melibatkan seluruh entitas masyarakat telah tercapai dengan baik yang ditandai dengan keterlibatan seluruh masyarakat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Dalam hal ini Pemerintah menggunakan konsep pembangunan inklusif dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon Rigis Jaya. Pembangunan inklusif sendiri merupakan pembangunan yang berfokus pada keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam pencapaian tujuan guna menjamin manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang masyarakat tersebut. Pembangunan inklusif pula akan mendorong masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam proses pengembangan sektor pariwisata berbasis Agrowisata Kampoeng Kopi yang diharapkan akan

meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Pekon Rigis Jaya.

- c. Melibatkan publik dalam proses pembangunan (khususnya masyarakat miskin dan marjinal).

Kelompok marjinal sendiri merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses dalam pembangunan. Namun dalam pembangunan pariwisata di pekan rigis jaya ini seluruh golongan masyarakat diajak untuk berkontribusi dalam pembangunan pariwisata dan pengembangan agrowisata kampoeng kopi tersebut tanpa memandang latar belakang masyarakatnya. Indikator ini telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini ditandai dengan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat di dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Upaya yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sektor pariwisata tentunya bukan tanpa kendala. Kelompok Sadar Wisata Pekon Rigis Jaya melakukan berbagai upaya agar masyarakat bersedia untuk berkontribusi dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis agrowisata kampoeng kopi yang merupakan salah satu destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

- d. Kelembagaan sosial sebagai media.

Kelembagaan sosial didalam pembangunan inklusif menjadi hal yang penting, sebab kelembagaan sosial dianggap sebagai media yang dapat digunakan dalam proses pengembangan agrowisata kampoeng kopi. kelembagaan sosial telah menjadi media promosi dan media pendekatan kepada seluruh entitas masyarakat untuk turut berkontribusi secara aktif dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi yang merupakan salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Lampung Barat.

e. Akses pembangunan sosial lebih tinggi.

Pada pengembangan agrowisata kampoeng kopi yang menerapkan pembangunan inklusif, pembangunan sosial menjadi salah satu fokus utama didalam proses pengembangannya. Sebab pembangunan sosial dianggap sebagai hal penting yang perlu diperhatikan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pemerintah setempat. Pekon Rigis Jaya sendiri terdiri dari 26 orang suku sunda, 705 orang suku Jawa, dan 35 orang bersuku Semendo. Hal tersebut menjadikan pembangunan sosial di lingkungan masyarakat menjadi penting dan telah menciptakan toleransi antar masyarakat.

f. Pendidikan inklusif (termasuk didalamnya kelompok difabel).

Pengembangan agrowisata kampoeng kopi juga mengimplementasikan pendidikan inklusif, dimana pendidikan inklusif ini melibatkan kelompok difabel dalam proses pengembangannya. Pada Pekon Rigis Jaya terdapat 6 orang dengan kebutuhan khusus, diantaranya tuna netra, tuna wicara, tuna rungu dan lumpuh. Masyarakat dengan kebutuhan khusus tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Pelaksanaan pendidikan inklusif ini telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan keterlibatan seluruh entitas masyarakat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi.

g. Kesehatan inklusif (termasuk wanita dan anak-anak).

Kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat. Kesehatan inklusif memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa memandang latar belakang masyarakat tersebut. Indikator ini telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan tingkat kesehatan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya termasuk didalamnya ibu dan anak-anak. Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab jika masyarakat memiliki tingkat kesehatan

yang baik maka kontribusi masyarakat didalam proses pengembangan agrowisata dapat dilaksanakan secara maksimal pula.

- h. Menciptakan kewarganegaraan inklusif yang secara struktural akan mendistribusikan nasionalisme dan secara kultural meminimalisir intoleransi.

Menciptakan kewarganegaraan yang tidak memandang ras, etnis, golongan, maupun agama akan menciptakan rasa nasionalisme dan toleransi yang baik antar masyarakat. Perbedaan yang ada dijadikan kekuatan dalam pembangunan dengan tidak menyinggung perbedaan yang ada. Indikator ini telah tercapai dengan baik yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang menghargai perbedaan yang ada serta menjunjung tinggi rasa toleransi antar masyarakat guna menciptakan lingkungan yang kondusif dan berkeadilan. Konsep pembangunan inklusif merupakan konsep pembangunan yang berfokus pada pemerataan manfaat dan hak yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakangnya. Konsep pembangunan inklusif diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon Rigis Jaya. Pembangunan berusaha menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan akan menimbulkan kesenjangan sosial ditengah masyarakat.

B. Inklusif Ekonomi

Terdapat beberapa indikator pembangunan inklusif ekonomi, diantaranya:

- a. Pertumbuhan ekonomi inklusif bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dengan tidak memandang latar belakang masyarakatnya akan memberikan pemerataan manfaat kepada seluruh masyarakat pula. Pertumbuhan ekonomi mayoritas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, hal tersebut juga merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan yang menjadi permasalahan di beberapa daerah. Indikator ini telah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian masyarakat yang secara langsung juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon Rigis Jaya. Pengembangan agrowisata kampoeng kopi dengan menerapkan konsep pembangunan inklusif telah merubah pola pikir masyarakat yang ada di pekon rigis jaya. Mulanya masyarakat enggan untuk berkontribusi di dalam pengelolaan agrowisata kampoeng kopi ini, namun setelah diberikan arahan dan diberikan pelatihan, perlahan masyarakat mulai berkontribusi didalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa sejak berdirinya agrowisata kampoeng kopi tersebut perekonomian masyarakat perlahan mulai meningkat yang disertai juga dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di pekon Rigis Jaya tanpa memandang latar belakang masyarakat tersebut.

- b. Menurunkan angka kemiskinan.

Perkembangan agrowisata kampoeng kopi dengan konsep pembangunan inklusif turut menurunkan angka kemiskinan yang ada di pekon Rigis Jaya. Dengan adanya agrowisata kampoeng kopi tersebut, masyarakat perlahan akan memanfaatkan agrowisata

tersebut untuk membuka usaha di sekitar anjungan-anjungan yang terdapat pada agrowisata tersebut untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan ke agrowisata kampoeng kopi, maka semakin meningkat pula pendapatan masyarakat dalam berwirausaha.

c. Meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan

Konsep pembangunan inklusif yang diterapkan pada agrowisata kampoeng kopi akan meminimalisir ketimpangan pendapatan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan konsep pembangunan pada agrowisata kampoeng kopi yang ada di pekon Rigis Jaya ini mengedepankan pemerataan manfaat dari adanya agrowisata kampoeng kopi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, budaya, maupun etnis tertentu.

d. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Pengembangan agrowisata kampoeng kopi juga turut meningkatkan lapangan pekerjaan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di pekon Rigis Jaya. Pengelolaan agrowisata kampoeng kopi akan melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pengelolaannya. Hal tersebut tentunya akan memberikan peluang kerja kepada masyarakat sekitar dengan tidak memandang ras maupun budaya tertentu di lingkungan masyarakat.

e. Menganalisis dampak pertumbuhan inklusif terhadap pertumbuhan kelas menengah.

Dampak pertumbuhan inklusif pada masyarakat kelas menengah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan perekonomian masyarakat yang perlahan meningkat dan

turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pekan rigis jaya. Pertumbuhan inklusif ini di awasi langsung oleh pemerintah kabupaten lampung barat, yang akan dilaporkan setiap bulannya oleh pengurus agrowisata kampoeng kopi.

f. Terbuka nya akses ekonomi.

Pembangunan inklusif pada sebuah daerah akan memberikan kebebasan pada akses perekonomian. Pada pembangunan inklusif, akses ekonomi menjadi hal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tidak melihat latar belakangnya. Indikator ini telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan perekonomian masyarakat yang perlahan meningkat sejak adanya agrowisata kampoeng kopi. Konsep pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi ini memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat dalam peningkatkan perekonomian mereka dengan tidak memandang latar belakang masyarakat tersebut. seluruh masyarakat bebas melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian, hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang mula nya hanya ibu rumah tangga, namun setelah adanya agrowisata kampoeng kopi membuka usaha perdagangan di sekitar anjungan-anjungan agrowisata kampoeng kopi.

Industri pariwisata merupakan sektor yang paling cepat mengalami peningkatan dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat di Pekon Rigis Jaya. Perkembangan agrowisata dengan konsep pembangunan inklusif tersebut turut meningkatkan perekonomian masyarakat dan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan pemerataan hak yang diterima oleh masyarakat tanpa memandang latarbelakangnya. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan agrowisata pun mulai mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kontribusi masyarakat dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi merupakan kunci keberhasilan

pembangunan pariwisata, sebab masyarakatlah yang akan menjalankan program pembangunan serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan program tersebut

Tabel 5. Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Usaha

No	Jenis Sektor (2020)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Total Anggota Rumah Tangga (Orang)	Jumlah Rumah Tangga Buruh (KK)	Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh (Orang)	Jumlah Pendapatan Perkapita Sektor Untuk Setiap Rumah Tangga
1.	Jasa Dan Perdagangan	8	29	0	0	21.000.000
2.	Industri Kecil, Menengah, Dan Besar	13	50	0	0	19.800.000
3.	Pertambangan	0	0	0	0	0
4.	Pertanian	12	49	0	0	10.000.000
5.	Peternakan	61	234	0	0	91.500.000
6.	Kerajinan	1	2	0	0	2.000.000
7.	Kehutanan	3	11	0	0	3.600.000
8.	Perkebunan	195	841	4	12	228.000.000
Jumlah			Rp 375.900.000			
No	Jenis Sektor (2019)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Total Anggota Rumah Tangga (Orang)	Jumlah Rumah Tangga Buruh (KK)	Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh (Orang)	Jumlah Pendapatan Perkapita Sektor Untuk Setiap Rumah Tangga
1.	Jasa Dan Perdagangan	7	23	0	0	21.000.000
2.	Industri Kecil, Menengah, Dan Besar	11	47	0	0	19.800.000
3.	Pertambangan	0	0	0	0	0
4.	Pertanian	12	49	1	3	9.000.000
5.	Peternakan	61	234	0	0	91.500.000
6.	Kerajinan	1	2	0	0	2.000.000
7.	Kehutanan	3	11	0	0	3.600.000
8.	Perkebunan	195	841	4	12	228.000.000

Jumlah	Rp 374.900.000
--------	----------------

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 6. Matriks Pembangunan Inklusif dalam Pengembangan Agrowisata Kampoeng kopi

No	Indikator Pembangunan Inklusif	Aktor Pentahelix
1.	Inklusif Sosial	<p>1. Pemerintah</p> <p>Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, pemerintah telah memenuhi seluruh indikator pada inklusif sosial yang ditandai dengan keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pengembangan agrowisata kampoeng kopi dengan tidak melihat latar belakang masyarakat tersebut. Hal ini akan berdampak positif kepada masyarakat dengan terciptanya kewarganegaraan inklusif yang mengutamakan rasa nasionalisme dan rasa toleransi yang tinggi antar masyarakat.</p>
		<p>2. Akademisi</p> <p>Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, akademisi telah melaksanakan seluruh indikator inklusif sosial dengan baik, yang ditandai dengan keterlibatan seluruh entitas masyarakat dalam mengimplementasikan program-program guna mencapai tujuan yang diharapkan dengan tidak memandang latar belakang masyarakat tersebut.</p>
		<p>3. Komunitas</p> <p>Komunitas telah menjalankan seluruh indikator inklusif sosial dengan baik dalam proses pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.</p>
		<p>4. Dunia usaha/Swasta</p> <p>Dunia usaha/swasta telah menjalankan</p>

		<p>seluruh indikator inklusif sosial dengan baik dalam proses pengembangan agrowisata kampoeng kopi, yang ditandai dengan pengimplementasian program-program yang telah melibatkan seluruh masyarakat dengan tidak memandang latar belakang masyarakat tersebut.</p>
		<p>5. Media Media merupakan pihak yang ikut berkontribusi dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Dalam hal ini media telah melaksanakan seluruh indikator inklusif sosial dengan baik yang ditandai dengan mengajak seluruh masyarakat untuk turut berkontribusi mempromosikan agrowisata kampoeng kopi. Media juga turut berkontribusi dalam hal pemasaran produk-produk unggulan di Pekon Rigis Jaya dengan melibatkan masyarakat tanpa memandang ras, golongan, entis, maupun agama masyarakat tersebut.</p>
2.	Inklusif Ekonomi	<p>1. Pemerintah Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, pemerintah telah melaksanakan seluruh indikator inklusif ekonomi dengan baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya perekonomian masyarakat di Pekon Rigis Jaya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jika perekonomian meningkat, maka angka kemiskinan pula akan berkurang seiring berjalannya waktu. Terbuka nya akses ekonomi akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja yang akan mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat tersebut. Sejak berdirinya agrowisata kampoeng kopi, perekonomian masyarakat perlahan mulai meningkat.</p> <p>2. Akademisi Akademisi turut berkontribusi dalam proses pengembangan agrowisata</p>

		<p>kampoeng kopi. Akademisi telah menjalankan indikator inklusif ekonomi dengan baik dengan melakukan pembinaan serta pendampingan masyarakat di bidang ekonomi dengan meningkatkan kompetensi masyarakat agar dapat bersaing dengan dunia luar.</p>
		<p>3. Komunitas Komunitas merupakan aktor yang turut berkontribusi dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi. Komunitas telah melaksanakan indikator inklusif ekonomi dengan baik yang ditandai dengan pengembangan sumber daya manusia kompeten yang diharapkan akan mampu bersaing dengan dunia luar dan mampu meningkatkan perekonomian dengan mengembangkan produk-produk unggulan di Pekon Rigis Jaya tersebut.</p>
		<p>4. Dunia usaha/Swasta Dunia usaha/swasta turut berkontribusi dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi dengan melaksanakan indikator inklusif ekonomi dengan baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan perekonomian yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak memandang latar belakang masyarakat tersebut. Dunia usaha berperan dalam pembangunan tempat pedagang di sekitar anjungan yang akan membuka akses ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian maka kesejahteraan masyarakat pun perlahan akan mengalami peningkatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.</p>
		<p>5. Media Dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi, media memiliki peranan yang cukup penting. Dalam hal ini media telah menjalankan indikator inklusif ekonomi dengan baik yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan</p>

		<p>perekonomian masyarakat dengan tidak memandang latar belakang masyarakat tersebut. Masyarakat diajak untuk memasarkan produk-produk unggulan dan mempromosikan agrowisata kampoeng kopi yang akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Jika hal itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka peluang usaha akan terbuka lebar dan diharapkan nantinya akan turut meningkatkan perekonomian dengan tidak memandang latar belakang masyarakat tersebut.</p>
--	--	--

4.1.2 KESIMPULAN

1. Sinergitas

indikator komunikasi dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi berjalan cukup baik yang dapat dilihat dari hubungan antar aktor pentahelix yang berjalan sesuai dengan tujuan. Para aktor pentahelix melakukan komunikasi antar pihak yang turut terlibat dalam proses pengembangan agrowisata kampoeng kopi secara virtual maupun secara tatap muka atau diskusi. Koordinasi dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi belum berjalan secara optimal, sebab seluruh aktor pentahelix yang terlibat dalam pembangunan inklusif pada agrowisata kampoeng kopi cenderung berjalan dengan hanya melibatkan beberapa aktor saja dalam pelaksanaan program yang diimplementasikan guna meningkatkan agrowisata kampoeng kopi tersebut. Walaupun beberapa aktor sudah melakukan koordinasi dengan aktor-aktor lain, namun beberapa aktor pentahelix yang turut terlibat dalam proses pengembangan cenderung berjalan masing-masing. Dalam hal ini akademisi merupakan aktor yang belum menjalankan koordinasi dengan baik yang hanya melibatkan masyarakat dalam melaksanakan

programnya.

2. Pembangunan Inklusif

Inklusif sosial dan inklusif ekonomi pada pengembangan agrowisata kampoeng kopi telah berjalan secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan seluruh indikator pada inklusif sosial dan inklusif ekonomi yang telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh aktor pentahelix. Pada inklusif sosial seluruh aktor telah menjalankan indikator ini dengan baik yang dapat dilihat dari keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pengembangan agrowisata kampoeng kopi dengan tidak memandang ras, golongan, etnis, maupun agama masyarakat tersebut. Pada inklusif ekonomi seluruh aktor telah menjalankan indikator ini dengan baik yang dapat dilihat dari meningkatnya perekonomian masyarakat yang turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon Rigis Jaya. Terbukanya akses ekonomi juga turut berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Adapun saran/rekomendasi yang penting dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Perlunya dibuat regulasi tentang kerjasama antar aktor pentahelix dalam pengembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penyumbang anggaran nasional dan turut meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Sebaiknya pemerintah daerah lebih sering melakukan pertemuan bersama aktor-aktor pentahelix yang membahas mengenai peningkatan pembangunan inklusif, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan sumber daya manusia yang kompeten guna menunjang pengembangan agrowisata kampoeng kopi dimasa mendatang.
- c. Sebaiknya pemerintah lebih memaksimalkan peran aktor pentahelix dalam pembangunan inklusif di agrowisata kampoeng kopi dengan meningkatkan kerjasama antar unsur pentahelix, hal ini bertujuan agar

pengembangan agrowisata kampoeng kopi dengan konsep pembangunan inklusif dapat berjalan dengan maksimal. Jika pembangunan inklusif berjalan dengan baik, maka seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat dari adanya agrowisata kampoeng kopi tanpa menimbulkan kesenjangan ditengah masyarakat.

- d. Diharapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lebih memaksimalkan program peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan pendampingan dan pengarahan kepada masyarakat maupun penggiat pariwisata dalam pengembangan agrowisata kampoeng kopi.
- e. Diharapkan pemerintah daerah lebih memaksimalkan promosi destinasi pariwisata kepada masyarakat baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang dikemas secara menarik untuk meningkatkan kunjungan pada destinasi wisata tersebut.
- f. Diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan infrastruktur serta sarana prasana yang ada pada agrowisata kampoeng kopi. Sebab infrastruktur juga berpengaruh pada jumlah kunjungan wisatawan ke agrowisata kampoeng kopi.
- g. Sebaiknya pemerintah daerah memaksimalkan peranan UMKM dengan melakukan pembinaan serta pengembangan produk-produk unggulan yang ada sehingga produk-produk tersebut dapat bersaing dengan produk-produk dari UMKM lain yang sudah terlebih dahulu maju.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya, Dan Sumantri. *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktik*. Cv Pustaka Setia, 2016.
- Budiman,. Arief, Dan Wandu S Barata. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Cetakan Ketiga. Pt Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Cahyadi, Hery Sigit. *Perencanaan Pariwisata, Merencanakan Pariwisata Secara Komprehensif Dan Terpadu*. Explore, Yogyakarta, 2019.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Perencanaan Dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat*. Suluh Media, 2018.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung, 2013.
- Warsilah, Henny. *Pembangunan Inklusif Dan Kebijakan Sosial Di Kota Solo, Jawa Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, T.T.
- Zebua, Manahati. *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*. Deepublish, 2016.

Jurnal

- Aribowo, Handy, Alexander Wirapraja, Dan Yudithia Dian Putra. “Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik.” *Jurnal Mebis (Manajemen Dan Bisnis)* 3, No. 1 (15 Juli 2018)
<https://doi.org/10.33005/Mebis.V3i1.21>.
- Astuti, Marhanani Tri. “Potensi Agrowisata Dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata.” *Jurnal. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*, 2020.
https://www.kemendparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/old_al/1/jdp%20vol_1%20no_1%202014%20potensi%20agrowisata%20dalam%20meningkatkan%20pengembangan%20pariwisata.pdf.
- Hidayat, Marceilla. “Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat).” *The Journal : Tourism And Hospitality Essentials Journal* 1, No. 1 (2011): 33–44.
<https://doi.org/10.17509/Thej.V1i1.1879>.

Junaid, Ilham. "Model Sinergi Unsur Pentaheliks Pariwisata Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Kota Parepare Dan Kabupaten Bone." *Sosiohumaniora* 21, No. 1 (3 Maret 2019): 22–33. <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V21i1.17016>.

Kagungan, Dian, Yulianti, Devi 2019. "The Synergy Among Stakeholders To Develop Pisang Island As Marine Tourism: The Case Of Underdeveloped Area." Other. Surabaya: Airlangga University, 5 Maret 2019. <https://E-Journal.Unair.Ac.Id/Masyarakat> Kebudayaan dan Politik /Article/View/8265/7202.

Kagungan, Dian, dkk 2021 Prospective Study of the Tourism Industry Strategy in the NewNormal Era, *International Journal of Entrepreneurship* (Print ISSN: 1099-9264; Online ISSN: 1939-4675) Scopus Q2 Research Article: 2021 Vol: 25 Issue: 2

Kagungan, Dian, dkk, 2021. Governments Approach on Marine Tourism Industry Policy. *International Journal Research in Bussiness and Social Science*, vol 8 No 5

Kagungan, Dian. 2018 Communities Empowerment and Collaboration Between Stakeholders on Utylization of Community Forest as a Solution for Poverty Reduction and Reduce Intencity of Chopping of Protected Forest in Lampung Province, *Journal of Law, Policy and Globalization Vol 78/2018*

Kagungan, Dian. 2018 E- TOURISM GOVERNANCE POLICY FOR COASTAL VILLAGE INI PESAWARAN REGENCY, Proseeding IICIS, Lampung University

Meutia, Intan Fitri, Kagungan, D. "Peningkatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dan Penguatan Peran Ekonomi Perempuan Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal." Other. Bandar Lampung: Lppm Universitas Lampung, Desember 2018. <http://repository.lppm.unila.ac.id/11560/>.

Mia Fairuza. 2017. "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah Di Kabupaten Banyuwangi)." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 5, No. 3 (Maret 2017): 1–13.

Nurulwahida, Siti. 2020 "Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan Model Pentahelix Dalam Pengembangan Wisata Haritage Kajoetangan Di Kota Malang." Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, <http://eprints.umm.ac.id/59661/>.

Persada, Citra. 2017 "Kolaborasi Dan Sinergitas Dalam Pembangunan Pariwisata Lampung Menuju Lampung Sebagai Destinasi Unggulan." *Bunga Rampai*

Pemikiran Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung, Oktober 2017, 27–40.

Rahmawati, Triana. 2014 “Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro)).” *Jurnal Administrasi Publik* 2, No. 4 (20 April 2014): 641–47.

Sari, Yuni Ratna, Dan Dian Kagungan. “Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal Dan Penguatan Kelembagaan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan* 14, No. 1 (31 Maret 2016): 88–104.
<https://doi.org/10.21009/Econosains.0141.07>.

Usman, Usman, Lukman Hakim, Dan Ihyani Malik. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kabupaten Bantaeng.” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, No. 2 (14 Oktober 2012).
<https://doi.org/10.26618/Ojip.V2i2.52>.

Yuningsih, Tri, Titi Darmi, Dan Susi Sulandari. “Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang.” *Jpsi (Journal Of Public Sector Innovations)* 3, No. 2 (31 Mei 2019): 84–93.
<https://doi.org/10.26740/Jpsi.V3n2.P84-93>.

TENTANG PENULIS

Dian Kagungan, Dosen Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung pendidikan S1 Fisip Universitas Lampung (1992), Magister Hukum Universitas Lampung (2005), S3 Studi Pembangunan Fisip Universitas Lampung tahun 2020-2023 (sedang ditempuh). Aktif kegiatan riset hibah DRPM-Kemendikbud RI 2009 sampai sekarang. Buku: Administrasi Pertanahan, Kebijakan Hutan kemasyarakatan, Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru, Kebijakan Penatakelolaan Teluk Kiluan. Selain kegiatan penelitian dan menulis, juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat



Selayang Pandang **LAMPUNG BARAT** **"KAMPOENG KOPI"**

**Sinergitas Pengembangan Potensi Pariwisata
Kampoeng Kopi Bumi Beguay Jejama**

Agrowisata Kampoeng Kopi Pekon Rigis Jaya Kabupaten Lampung Barat merupakan lokasi pariwisata sebagai sarana edukasi bagi pengelolaan kopi mulai dari proses pembibitan hingga proses siap konsumsi. Peran penting Pemerintah dalam bidang kepariwisataan di dasarkan pemikiran birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat.

Buku ini berusaha menemukan titik kompromi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan masyarakat sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi. Sinergitas aktor pentahelix dalam pengembangan agrowisata Kampoeng Kopi merupakan keselarasan sistem dan hubungan antar aktor Pentahelix bagi pembangunan Agrowisata Kampoeng Kopi Rigis Jaya.



Dian Kagungan, Dosen Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung pendidikan S1 Fisip Universitas Lampung (1992), Magister Hukum Universitas Lampung (2005), S3 Studi Pembangunan Fisip Universitas Lampung tahun 2020-2023 (sedang ditempuh). Aktif kegiatan riset hibah DRPM-Kemendikbud RI 2009 sampai sekarang. Buku: Administrasi Pertanahan, Kebijakan Hutan kemasyarakatan, Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru, Kebijakan Penatakelolaan Teluk Kiluan. Selain kegiatan penelitian dan menulis, juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Diterbitkan Atas Kerjasama dengan



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS LAMPUNG**

ISBN: 978-602-52170-8-1



9 786025 217081

